

**ANALISIS PENGARUH DANA PERIMBANGAN DAN PEKERJA
TERHADAP PDRB DI JAWA TENGAH 2007-2009**

Izzatul Ulfi S.

Drs. H. Edy Yusuf AG, M.Sc, Ph.D

ABSTRACT

Economic growth is defined as an increasing ability of economy in producing goods and services (output) in particular place and time. Economic growth is one of the indicators of economic development. Economic growth and Gross Domestic Regional Product (GDRP) of municipalites/cities in Central Java is relatively low, at below 5 persen. In order to enhance the output, it needs source of income and employment. Largest source of local revenue derived from Balanced Fund. Recent years has fluctuated. This fund and employment used as production factor to increase output to certain extent.

The purpose of this study is to analyze the effect of Balance Fund as (natural resources revenue sharing and tax revenue sharing, General Allocation Fund, Special Allocation Fund) and employment to Gross Domestic Regional Product (GDRP) of Central Java, 2007-2009. This research use regression analysis by Fixed Effect model. The use of dummy region in this study helps to observe variations of pattern in Central Java.

The results obtained from data analysis show that natural resources revenue sharing and tax revenue sharing, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, employment has positive and significant impact on Gross Domestic Regional Product (GDRP) in Central Java

Keyword : GDRP, Balanced Funds, natural resources revenue sharing and tax revenue sharing, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, employment

A. PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal pada intinya memberikan keleluasaan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi berbagai kegiatan pemerintah dan pembangunan di wilayahnya. Implikasi yang diharapkan adalah pemerintah daerah dapat melaksanakan pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien, untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam kaitannya dengan aspek perekonomian, desentralisasi fiskal berujung pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat daerah. Menurut Dewi Pusporini (2006) salah satu indikator utama dalam melihat perkembangan kesejahteraan ekonomi masyarakat adalah *output*. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satu langkah utama yang dapat ditempuh melalui peningkatan *output* daerah.

Tujuan otonomi daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya. Menurut Boediono (1992) salah satu ukuran pertumbuhan ekonomi daerah adalah pendapatan domestik regional bruto (PDRB). Pendapatan domestik regional bruto (PDRB) suatu daerah dapat menunjukkan seberapa besar aktivitas perekonomian secara keseluruhan. Konsep pendapatan domestik regional bruto adalah ukuran yang paling sering dipakai sebagai indikator pertumbuhan ekonomi. Domestik namun bukan satu satunya indikator pertumbuhan ekonomi domestik. Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses, bukan merupakan suatu gambaran ekonomi pada suatu periode tertentu, ada perkembangan atau perubahan dan penggunaan waktu.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2007-2009 menunjukkan pertumbuhan yang fluktuatif. PDRB atas dasar harga konstan tertinggi Jawa Tengah tahun 2009 sebesar 175.685.267,56 juta. Sedangkan laju pertumbuhan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Tahun 2008 mengalami penurunan sebesar 0,138 persen dari tahun sebelumnya dan tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 0,75 persen dari tahun sebelumnya. Terjadi penurunan karena masih terkenanya dampak krisis global pada tahun 2007.

Dilihat dari data PDRB kabupaten/kota di Jawa Tengah, dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah hanya 13 kabupaten/kota yang memiliki PDRB di atas rata-rata PDRB Jawa Tengah. Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2007-2009 tergolong rendah, yaitu masih di bawah 5 persen.

Untuk meningkatkan *output* kabupaten/kota maka dibutuhkan sumber pembiayaan. Salah satu pembiayaan berasal dari transfer pemerintah yaitu dari Dana Perimbangan. Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (SDA), DAU, dan DAK. Dana Perimbangan sebagai faktor produksi modal yang digunakan untuk belanja pemerintah daerah guna meningkatkan *output*. Adanya peningkatan *output* dalam jangka panjang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Tengah mendapat alokasi dana perimbangan di atas 80 persen. Tingginya alokasi proporsi dana perimbangan kabupaten/kota di Jawa Tengah, menunjukkan belum adanya kemandirian dalam pembiayaan pembangunan setelah otonomi daerah. Proporsi Dana Perimbangan kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2007-2009 terhadap APBD mengalami fluktuasi. Walaupun pada tahun 2008 Dana perimbangan kabupaten/kota di Jawa Tengah mengalami penurunan. Akan tetapi pada tahun 2009 alokasi Dana Perimbangan kabupaten/kota di Jawa Tengah mengalami kenaikan. Rata-rata proporsi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat pada tahun 2007 sebesar 83,463 persen kemudian menurun pada tahun 2008 menjadi 81,312 persen dan naik kembali pada tahun 2009 menjadi 84,157 persen. Sehingga proporsi untuk PAD dan pendapatan lain-lain yang sah untuk tahun 2007 hanya sebesar 16,537 persen kemudian meningkat pada tahun 2008 sebesar 18,688 persen dan turun kembali pada tahun 2009 sebesar 15,843 persen.

Dana Perimbangan atau transfer dana dari pusat masih menjadi sumber penerimaan dominan bagi daerah. Tingginya proporsi Dana Perimbangan terhadap APBD menunjukkan masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Ketergantungan pada pemerintah pusat berakibat pada peran otonomi daerah tidak berjalan dengan optimal.

Selain dana perimbangan sebagai faktor modal, faktor tenaga kerja juga merupakan faktor yang mempengaruhi *output* suatu daerah. Angkatan kerja yang besar akan terbentuk dari jumlah penduduk yang besar. Akan tetapi, pertumbuhan penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan efek yang buruk terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut Todaro (2000) pertumbuhan penduduk yang cepat mendorong timbulnya masalah keterbelakangan dan membuat prospek pembangunan semakin jauh. Akan tetapi, masalah kependudukan yang timbul bukan karena banyaknya jumlah anggota keluarga, melainkan karena mereka terkonsentrasi pada daerah perkotaan saja sebagai akibat dari cepatnya laju migrasi dari desa ke kota. Namun demikian jumlah penduduk yang cukup dengan tingkat pendidikan yang tinggi dan memiliki skill akan mampu mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi. Dari jumlah penduduk usia produktif yang besar maka akan mampu meningkatkan jumlah angkatan kerja yang tersedia dan pada akhirnya akan mampu meningkatkan produksi *output* di suatu daerah.

Jumlah angkatan kerja di Jawa Tengah dari tahun 2006-2009 berfluktuasi. Jumlah angkatan kerja baik golongan pekerja maupun mencari kerja sempat mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2008 yang berarti telah terjadi penurunan jumlah angkatan kerja pada tahun tersebut. Perkembangan pencari kerja lebih besar dibandingkan dengan pekerja di Jawa Tengah. Dilihat dari segi jumlah, jika semakin banyak angkatan kerja yang tergolong bekerja digunakan dalam proses produksi, maka semakin banyak *output* yang dihasilkan dari kegiatan produksi. Meskipun hal tersebut hanya berlaku sampai titik tertentu karena dibatasi oleh *The Law of Diminishing Return*.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, faktor produksi modal daerah yang dicerminkan dari proporsi dana perimbangan kabupaten/kota di Jawa Tengah dalam periode 2007-2009 mengalami fluktuasi. Walaupun alokasi dana perimbangan sangat tinggi, akan tetapi tingkat PDRB dan pertumbuhan ekonomi masih rendah. Angkatan kerja sebagai faktor produksi tenaga kerja relatif rendah. Untuk itu diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana pengaruh Dana Perimbangan dan angkatan kerja yang tergolong bekerja (pekerja) terhadap PDRB di Jawa Tengah, serta bagaimana arah hubungan tersebut.

Rumusan Masalah

Pertumbuhan ekonomi secara umum didefinisikan sebagai peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa di tempat dan waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator pembangunan ekonomi. Tahun 2007-2009 pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah rendah. Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi masih di bawah 5 persen. PDRB dari 35 kabupaten/kota hanya 14 kabupaten/kota yang memiliki tingkat PDRB di atas rata-rata PDRB Jawa Tengah. Sehingga untuk meningkatkan PDRB dibutuhkan faktor modal sebagai sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai *output*. Sumber pendapatan terbesar di Jawa Tengah berasal dari Dana Perimbangan. Hal itu dapat dilihat dari besarnya alokasi proporsi Dana Perimbangan yang cukup tinggi. Akan tetapi selama tahun 2007-2009 besar proporsi Dana Perimbangan mengalami fluktuasi. Oleh karena itu, Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus yang merupakan faktor modal daerah yang digunakan untuk sumber pembiayaan diharapkan mendorong aktivitas *output* sampai pada batas tertentu.

Untuk meningkatkan *output*, selain faktor modal dibutuhkan faktor tenaga kerja. Partisipasi aktif dari seluruh masyarakat akan mempercepat pertumbuhan daerah melalui peningkatan *output*. Selama tahun 2007-2009 angkatan kerja sempat mengalami pertumbuhan yang negatif pada tahun 2008. Pertumbuhan negatif ini menunjukkan jumlah angkatan kerja pada tahun 2008 lebih rendah dari pertumbuhan angkatan kerja pada tahun sebelumnya. Angkatan kerja adalah orang yang bekerja dan aktif mencari pekerjaan. Dilihat dari segi jumlah, jika semakin banyak angkatan kerja yang tergolong bekerja digunakan dalam proses produksi, maka semakin banyak *output* yang dihasilkan dari kegiatan produksi. Meskipun hal tersebut hanya berlaku sampai titik tertentu karena dibatasi oleh *The Law of Diminishing Return*.

Dana perimbangan tahun 2007-2009 cukup besar sebagai perubahan penerimaan yang dominan atau sebagai faktor produksi modal. Dana perimbangan berperan untuk pembiayaan pembangunan. Angkatan kerja yang tergolong bekerja

(pekerja) sebagai faktor tenaga kerja yang digunakan sebagai input guna mencapai tingkat *output* tertentu. Beberapa tahun terakhir mengalami fluktuasi, ini kemudian akan membawa dampak pada pertumbuhan *output* itu sendiri.

Dari uraian di atas maka perumusan masalah penelitian ini adalah seberapa besar dampak yang mungkin ditimbulkan dari perubahan Dana Perimbangan dan angkatan kerja yang tergolong bekerja (pekerja) terhadap PDRB. Peningkatan PDRB ini kemungkinan dipengaruhi oleh Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan angkatan kerja yang tergolong bekerja (pekerja). Dengan melihat pengaruh Dana Perimbangan dan pekerja kaitannya dengan PDRB di Jawa Tengah.

B. TELAAH TEORI

Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan-perubahan dan struktur-struktur dan corak kegiatan ekonomi (Sadono Sukirno, 1994). Sadono Sukirno menyatakan bahwa secara umum pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai peningkatan kemampuan suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa di suatu negara pada suatu waktu tertentu. Menurut Robinson Tarigan (2004) ekonomi wilayah (daerah) sebagai pertambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di wilayah tersebut, yakni kenaikan seluruh nilai tambah (*value added*) yang terjadi di wilayah itu. Pertambahan ini diukur dalam nilai riil atau dinyatakan dalam harga konstan wilayah dan wilayah lain. Menurut Faried W. (1992) pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan pendapatan nasional riil. Perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang apabila terjadi pertumbuhan *output* riil. *Output* riil suatu perekonomian bisa juga tetap konstan atau mengalami penurunan. Perubahan ekonomi meliputi pertumbuhan, statis ataupun penurunan, dimana pertumbuhan adalah perubahan yang bersifat positif sedangkan penurunan merupakan perubahan negatif.

Produk Domestik suatu wilayah merupakan nilai seluruh produk dan jasa yang diproduksi di wilayah tersebut tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari wilayah tersebut atau tidak. Pendapatan yang timbul oleh

adanya kegiatan produksi tersebut merupakan pendapatan domestik. Sedangkan yang dimaksud dengan wilayah domestik atau region adalah meliputi wilayah yang berada di dalam wilayah geografis region tersebut.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. Tahun 2000 digunakan sebagai tahun dasar karena dianggap representatif untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Angka-angka PDRB dapat dihitung dengan tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, pendekatan pengeluaran. Secara konsep ketiga pendekatan tersebut memberikan jumlah yang sama antara jumlah pengeluaran dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksinya.

Berdasarkan cara penyajian, menurut website BPS, Produk Domestik Regional Bruto disusun dalam dua bentuk yaitu PDRB atas dasar harga konstan dan PDRB atas dasar harga berlaku. Dalam konteks regional kesejahteraan masyarakat diukur melalui Produk Domestik Regional bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui PDRB ditentukan oleh beberapa faktor yaitu tanah dan kekayaan alam lainnya, jumlah dan kualitas dari produk dan tenaga kerja, kapital, tingkat teknologi, sistem sosial dan sikap masyarakat.

Fungsi produksi adalah suatu persamaan yang menunjukkan hubungan ketergantungan (fungsional) antara tingkat input yang digunakan dalam proses produksi dengan tingkat *output* yang dihasilkan. Dalam model pertumbuhan ekonomi Neo Klasik Solow (*Solow Neo Classical Growth Model*) maka fungsi produksi agregat standar yaitu:

$$Y = K^{\alpha}(AL)^{1-\alpha}$$

Y = Produk Domestik Regional Bruto

K = stok modal

L = tenaga kerja

A = konstanta yang merefleksikan produktivitas tenaga kerja

α = melambangkan elastisitas *output* terhadap model

Menurut Nicholson W. (1991) bahwa suatu fungsi produksi suatu barang atau jasa tertentu (q) adalah :

$$q = f(k, L)$$

k = stok modal

L = tenaga kerja

Fungsi produksi memperlihatkan jumlah maksimal suatu barang/jasa yang dapat diproduksi dengan menggunakan kombinasi alternatif antara k dan L maka apabila salah satu masukan ditambah satu unit tambahan dan masukan lainnya dianggap tetap akan menyebabkan tambahan keluaran yang dapat diproduksi. Tambahan keluaran yang diproduksi ini yang disebut dengan produk fisik marjinal (*Marginal Physical Product*). Apabila jumlah tenaga kerja ditambah terus dan faktor produksi lain dipertahankan konstan, pada tahap awal akan menunjukkan peningkatan produktivitas namun pada suatu tingkat tertentu akan memperlihatkan penurunan produktivitasnya serta setelah mencapai tingkat keluaran maksimal setiap penambahan tenaga kerja akan mengurangi pengeluaran.

Menurut Halim (2001) salah satu sasaran pokok dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat, sehingga kebutuhan dari pihak masyarakat dapat dipahami oleh pihak pemerintah. Pemerintah perlu memberikan alokasi belanja pembangunan sektor publik yang lebih besar. Untuk pembiayaan alokasi, sumber dana dapat diperoleh misalnya dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah.

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dan pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Dengan

adanya dana perimbangan, diharapkan akan mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah antara pusat dan daerah, serta untuk mengurangi kesenjangan antar daerah.

Untuk meningkatkan *output* maka dibutuhkan sumber pembiayaan (*kapital*). Salah satu pembiayaan berasal dari transfer pemerintah yaitu dari dana perimbangan. Dana perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, DAU, DAK. Dan Perimbangan tersebut yang nantinya akan digunakan untuk belanja pemerintah daerah sehingga akan meningkatkan *output*.

Golongan yang bekerja adalah mereka yang sudah aktif dalam kegiatannya yang menghasilkan barang dan jasa, sedangkan sebagian lain tergolong yang siap bekerja dan sedang berusaha mencari pekerjaan dinamakan pencari kerja atau penganggur (J. Simanjuntak,1998). Semakin banyak angkatan kerja yang digunakan dalam proses produksi maka *output* hasil produksi akan mengalami peningkatan sampai batas tertentu.

Terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan latar belakang dari penelitian ini adalah Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan pekerja berpengaruh terhadap PDRB. Berdasarkan penelitian terdahulu Joko Waluyo (2007) Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. Hal yang sama disampaikan oleh penelitian Bintoro Arianto (2002) Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. Sedangkan angkatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB menurut penelitian Amin Pujiati.

Berdasarkan penelitian Amin Pujiati (2008) Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, angkatan kerja yang tergolong bekerja berpengaruh dan signifikan terhadap PDRB. Dan sesuai dengan penelitian Bintoro Arianto (2002) Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. Dana perimbangan dan angkatan kerja sebagai faktor produksi barang dan jasa yang nantinya akan mendorong peningkatan *output* sampai batas tertentu.

Kerangka Pemikiran

Dana perimbangan sebagai kontribusi utama dalam pendapatan daerah, memberikan peran penting dalam menyokong pertumbuhan ekonomi daerah. Besar dana perimbangan yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah harus dipertimbangkan secara matang sehingga belanja pemerintah daerah yang dibiayai dari dana perimbangan dapat meningkatkan *output* sampai pada batas tertentu. Hal itu sesuai dengan penelitian Dewi Pusporini (2006) bahwa desentralisasi fiskal berujung pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat daerah. Salah satu indikator utama dalam melihat perkembangan kesejahteraan ekonomi masyarakat adalah PDRB. Sehingga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satu langkah utamanya dapat ditempuh melalui peningkatan *output* atau melalui pertumbuhan ekonomi daerah. Atau dengan kata lain Dana perimbangan dialokasikan untuk membiayai infrastruktur ekonomi sehingga sarana dan prasarana menunjang kegiatan produksi barang dan jasa yang nantinya akan mendorong peningkatan *output* sampai pada batas tertentu. Maka fungsi produksi :

$$Q = f(k, L)$$

Secara matematis kerangka pemikiran dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = f(\text{BHPBP}, \text{DAU}, \text{DAK}, L)$$

keterangan :

$$Y = \text{PDRB}$$

BHPBP = Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

DAU = Dana Alokasi Khusus

DAK = Dana Alokasi Khusus

L = pekerja

Selain itu adalah peran penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja dalam hal ini adalah angkatan kerja yang aktif mencari pekerjaan. Jika semakin banyak jumlah angkatan kerja yang digunakan dalam proses produksi maka akan semakin banyak *output* yang dihasilkan dari kegiatan produksi tersebut. Meskipun hal tersebut hanya berlaku sampai titik tertentu karena dibatasi oleh *The Law of Diminishing Return*.

Hipotesis

1. Diduga variabel Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Jawa Tengah.
2. Diduga variabel Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Jawa Tengah.
3. Diduga variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Jawa Tengah.
4. Diduga variabel pekerja (L) berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Jawa Tengah.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen dan empat variabel independen yaitu : PDRB atas dasar harga konstan 2000 sebagai variabel dependen dan bagi hasil pajak dan bukan pajak (BHPBP), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan pekerja (L) sebagai variabel independen. Definisi operasional sebagai berikut :

1. PDRB

Produk Domestik Regional Bruto menunjukkan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah. Menurut BPS (2008), secara umum PDRB memberikan gambaran kinerja ekonomi makro suatu wilayah dari waktu ke waktu. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun. Nilai PDRB yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2007-2009. Satuan variabel PDRB ini adalah rupiah.

2. Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP)

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagi hasilkan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu. Nilai dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dana Bagi Hasil Pajak ditambah Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA). Data dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak adalah data sekunder dan diambil

dari ringkasan Realisasi APBD kabupaten/kota se-Indonesia tahun 2007-2009 Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan data publikasi. Satuan variabel Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak ini adalah rupiah.

3. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD dialokasikan untuk mendanai atau melaksanakan fungsi layanan dasar secara umum kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Tujuan alokasinya untuk pemerataan kemampuan (*horizontal imbalances*) keuangan daerah. Nilai dari Dana Alokasi Umum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data diambil dari ringkasan Realisasi APBD kabupaten/kota se-Indonesia tahun 2007-2009 Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan data publikasi. Satuan dari variabel Dana Alokasi Umum adalah rupiah.

4. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah. Nilai dari Dana Alokasi Khusus yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data diambil dari ringkasan Realisasi APBD kabupaten/kota se-Indonesia tahun 2007-2009 Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan data publikasi. Satuan variabel Dana Alokasi Khusus adalah rupiah.

5. Pekerja (L)

Berdasarkan definisi yang diberikan oleh J. Simanjuntak (1998), angkatan kerja adalah golongan tenaga kerja yang terdiri dari mereka yang bekerja dan yang mencari kerja. Data angkatan kerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah angkatan kerja yang tergolong bekerja (pekerja). Data angkatan kerja diambil dari data angkatan kerja yang tergolong bekerja penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut kabupaten/kota dan kegiatan selama seminggu yang lalu di Jawa Tengah tahun 2007-2009, dinyatakan dalam satuan orang.

6. Dummy kabupaten/kota

Penggunaan *Dummy* wilayah dalam penelitian ini adalah untuk melihat perbedaan yang terjadi antar wilayah (kabupaten/kota) dalam tiga tahun periode penelitian terhadap variabel PDRB. Secara administratif Provinsi Jawa tengah

terdiri atas 29 Kabupaten dan 6 Kota. Untuk penggunaan variabel *dummy*, diperlukan adanya *benchmark*, yaitu wilayah yang menjadi pembanding untuk wilayah lainnya. Dalam Gujarati (2003), pemilihan wilayah benchmark tidak menggunakan kriteria tertentu, setiap wilayah bebas untuk dijadikan *benchmark*. Akan tetapi kriteria yang dapat digunakan sebagai *benchmark* adalah wilayah yang memiliki pengaruh yang besar terhadap wilayah lainnya dari berbagai sisi khususnya ekonomi. Dengan pertimbangan tersebut, maka diputuskan bahwa *benchmark* (wilayah pembanding) adalah Kota Semarang. Sehingga, dari 35 kabupaten/kota akan diambil 34 wilayah untuk dijadikan variabel *dummy* dan 1 *benchmark*. Variabel *dummy* itu antara lain Kabupaten Cilacap (D₁), Kabupaten Banyumas (D₂), Kabupaten Purbalingga (D₃), Kabupaten Banjarnegara (D₄), Kabupaten Kebumen (D₅), Kabupaten Purworejo (D₆), Kabupaten Wonosobo (D₇), Kabupaten Magelang (D₈), Kabupaten Boyolali (D₉), Kabupaten Klaten (D₁₀), Kabupaten Sukoharjo (D₁₁), Kabupaten wonogiri (D₁₂), Kabupaten Karanganyar (D₁₃), Kabupaten Sragen (D₁₄), Kabupaten Grobogan (D₁₅), Kabupaten Blora (D₁₆), Kabupaten Rembang (D₁₇), Kabupaten Pati (D₁₈), Kabupaten Kudus (D₁₉), Kabupaten Jepara (D₂₀), Kabupaten Demak (D₂₁), Kabupaten Semarang (D₂₂), Kabupaten Temanggung (D₂₃), Kabupaten Kendal (D₂₄), Kabupaten Batang (D₂₅), Kabupaten Pekalongan (D₂₆), Kabupaten Pemalang (D₂₇), Kabupaten Tegal (D₂₈), Kabupaten Brebes (D₂₉), Kota Magelang (D₃₀), Kota Surakarta (D₃₁), Kota Salatiga (D₃₂), Kota Pekalongan (D₃₄), Kota Tegal (D₃₅).

Penelitian ini menggunakan data panel yang merupakan penggabungan data deret berkala (*time-series*) dan antar individu (*cross-section*). Data *time-series* menggunakan data 3 tahunan dimulai dari tahun 2007-2009 dan data *cross-section* yaitu 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota. Teknik panel data dengan menggabungkan jenis data *cross section* dan *time series* sehingga menghasilkan 105 observasi.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang berkaitan dengan permasalahan yang

diteliti. Sedangkan analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis informasi kuantitatif (data yang dapat diukur, diuji dan diinformasikan dalam bentuk persamaan, tabel dan sebagainya). Tahap analisis kuantitatif terdiri dari estimasi model regresi dengan menggunakan data panel, regresi persamaan linear berganda dengan menggunakan metode *fixed effec*, deteksi penyimpangan asumsi klasik dan pengujian hipotesis. Untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan akan digunakan model ekonometrika.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Metode Fixed Effect Model*, dengan menggunakan *cross section dummy variabel (dummy wilayah)* 34 kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah, dengan Kota Semarang sebagai benchmark. Sehingga terdapat 34 *intercept* yang berbeda-beda antar wilayah yang menunjukkan karakteristik masing-masing wilayah.

Spesifikasi penelitian yang digunakan untuk menguji penelitian ini adalah model regresi linier berganda. Persamaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$PDRB = f(BHPBP, DAU, DAK, L, D)$$

dimana:

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto

BHPBP = Bagi hasil pajak dan bukan pajak

DAU = Dana Alokasi Umum

DAK = Dana Alokasi Khusus

L = pekerja

D = dummy

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari hasil analisis penelitian mengenai analisis pengaruh dana perimbangan dan pekerja terhadap PDRB di Jawa Tengah 2007-2009 sudah layak digunakan karena telah memenuhi berbagai uji, yaitu deteksi penyimpangan asumsi klasik (deteksi multikolinearitas, deteksi heterokedasitas, deteksi autokorelasi) dan pengujian hipotesis.

1. Deteksi Penyimpangan Asumsi Klasik

a. Deteksi Multikolinearitas

Hasil *Uji klien* menunjukkan bahwa model persamaan pengaruh Bagi Hasil Pajak Dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, pekerja terhadap PDRB di Jawa Tengah tahun 2007-2009 diatas menunjukkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antara variabel independen karen nilai regresi R^2 parsial lebih kecil dibandingkan nilai R^2 regresi utama.

Deteksi Multikolinearitas R^2 Auxiliary Regression

Variabel	r2	R2	Keterangan
BHPBP dengan DAU, DAK, L	0,972	0,988	tidak ada multikolinearitas
DAU dengan BHPBP, DAK, L	0,979	0,988	tidak ada multikolinearitas
DAK dengan BHPBP, DAU, L	0,919	0,988	tidak ada multikolinearitas
L dengan BHPBP, DAU, DAK	0,984	0,988	tidak ada multikolinearitas

Sumber : Diolah dengan Eviws 6

b. Deteksi Autokorelasi

Hasil dari hasil Regresi utama menunjukkan bahwa nilai *Durbin-Watson stat* sebesar 2,032. Hasil dari *Durbin-Watson* tabel ($\alpha = 5\%$) dengan $n=105$ adalah $d1= 1,604$ $du=1,762$ dan $4-du= 2,2383$ $4-d1=2,340$. Sehingga *Durbin-Watson stat* terletak pada $<d1 < du < D_w < 4-du < 4-d1$ atau $1,604 < 1,762 < 1,893 < 2,2383 < 2,340$.

Untuk menentukan ada atau tidaknya autokorelasi, maka D_w tabel dibandingkan dengan perhitungan dari hasil regresi utama yaitu D_w statistik. Dilihat dari identifikasi autokorelasi melalui *Durbin-Watson* maka dapat disimpulkan bahwa model tidak terdapat autokorelasi.

Hasil Uji *Durbin Watson*

Autokorelasi positif	Tidak dapat diputuskan	Tidak ada autokorelasi	Tidak dapat diputuskan	Autokorelasi negatif	
	d1	du	4-du	4-d1	4
	1,604	1,762	2,2383	2,340	4

c. Deteksi Heterokedastisitas

Heteroskedastisitas muncul apabila kesalahan atau residual dari model yang diamati tidak memiliki varians yang konstan dari satu observasi ke observasi lainnya. Artinya, setiap observasi mempunyai reliabilitas yang berbeda akibat perubahan dalam konsisi yang melatarbelakangi tidak terangkum dalam spesifikasi model (Imam Ghozali, 2009).

Dalam penelitian ini digunakan uji Glejser dan uji Park untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Hasil Uji Glejser

Variabel Dependen = RESABS

Variabel	t-statistik	probability	keterangan
BHPBP	-0,198	0,844	bebas heteroskedastisitas
DAU	0,823	0,414	bebas heteroskedastisitas
DAK	-0,518	0,606	bebas heteroskedastisitas
L	0,293	0,771	bebas heteroskedastisitas

Sumber : Diolah dengan Eviews 6

Hasil Uji Park

Variabel Dependen = LOG(RES2)

Variabel	t-statistik	probability	Keterangan
lnBHPBP	-0,122	0,903	bebas heteroskedastisitas
lnDAU	-0,514	0,609	bebas heteroskedastisitas
lnDAK	0,455	0,650	bebas heteroskedastisitas
lnL	0,302	0,764	bebas heteroskedastisitas

Sumber : Diolah dengan Eviews 6

Berdasarkan hasil perhitungan dengan uji Glejser maupun uji Park terlihat bahwa t-statistik untuk masing-masing variabel independen yang dibawah t-tabel sebesar 1,660 ($df = (n-k) = 105 - 4 = 101$). Sedangkan t-statistik untuk masing-masing variabel independen memiliki nilai lebih rendah dari nilai t-tabel ($t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$), sehingga menandakan bahwa tidak ada heteroskedastisitas pada variabel independen. Di samping itu, dalam perhitungan *probability of value* juga

memperlihatkan bahwa nilai probabilitas yang di atas $\alpha = 5$ persen, menunjukkan bahwa variabel independen tidak terdapat heterokedasitas.

2. Pengujian Hipotesis

a. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Pengujian terhadap variabel independen secara bersama-sama di dalam model dapat dilakukan dengan uji simultan (Uji-F). Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Berdasarkan regresi pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, pekerja terhadap PDRB di Jawa Tengah tahun 2007-2009 (Tabel 4.17) menggunakan taraf keyakinan 95 persen ($\alpha = 5$ persen), df pembilang 3 ($k-1 = 4-1$) dan df penyebut 101 ($n-k = 105-4$), maka diperoleh F-tabel sebesar 2,69.

Dari hasil regresi utama pengaruh dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, pekerja terhadap PDRB di Jawa Tengah tahun 2007-2009 diperoleh F-statistik sebesar 1555,921 (Tabel 4.17) dan nilai *probability value* dibawah tingkat signifikansi ($\alpha = 5$ persen) memperkuat hasil uji F. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen ($F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$) atau (*Probability value* < tingkat signifikansi).

b. Uji Signifikansi Individual (Uji t)

Uji ststistik-t dapat menunjukkan seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dalam regresi pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, pekerja terhadap PDRB di Jawa Tengah tahun 2007-2009 (Tabel 4.17) dengan $\alpha = 5$ persen dan degree of freedom (df) = 105 ($n-k = 105-4$), maka diperoleh nilai t-tabel sebesar 1,660. Perbandingan antara t-hitung dan t-tabel dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Hasil Uji Signifikansi individual (Uji t)

Variabel	t-statistik	t-tabel	Keterangan
BHPBP	2,880	1,660	Signifikan
DAU	4,055	1,660	Signifikan
DAK	3,361	1,660	Signifikan
L	3,452	1,660	Signifikan

Sumber : Diolah dengan Eviews 6

1. Uji t-statistik variabel Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP).
Hasil perhitungan yang didiapat adalah t-statistik BHPBP = 2,880 ($df = n-k = 105-4 = 101$, $\alpha = 0,05$), sehingga t-statistik > t-tabel (2,880 > 1,660). Perbandingan antara t-statistik dengan t-tabel, yang menunjukkan bahwa t-statistik > t-tabel, oleh karena itu variabel Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Jawa Tengah tahun 2007-2009.
2. Uji t-statistik variabel Dana Alokasi Umum (DAU)
Hasil perhitungan yang didapat adalah t-statistik DAU = 4,055 ($df = n-k = 105-4 = 101$, $\alpha = 0,05$), sehingga t-statistik > t-tabel (4,055 > 1,660). Perbandingan antara t-statistik dengan t-tabel, yang menunjukkan bahwa t-statistik > t-tabel, oleh karena itu variabel Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Jawa Tengah tahun 2007-2009.
3. Uji t-statistik variabel Dana Alokasi Khusus (DAK)
Hasil perhitungan yang didapat adalah t-statistik DAK = 3,361 ($df = n-k = 105-4 = 101$, $\alpha = 0,05$), sehingga t-statistik > t-tabel (3,361 > 1,660). Perbandingan antara t-statistik dengan t-tabel, yang menunjukkan bahwa t-statistik > t-tabel, oleh karena itu variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Jawa Tengah tahun 2007-2009.
4. Uji t-statistik variabel pekerja (L)
Hasil perhitungan yang didapat adalah t-statistik L = 3,452 ($df = n-k = 105-4 = 101$, $\alpha = 0,05$), sehingga t-statistik > t-tabel (3,452 > 1,660).

Perbandingan antara t-statistik dengan t-tabel, yang menunjukkan bahwa t-statistik > t-tabel, oleh karena itu variabel pekerja (L) berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Jawa Tengah tahun 2007-2009.

3. Interpretasi Hasil

Dari hasil regresi Pengaruh Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, pekerja terhadap PDRB di Jawa Tengah tahun 2007 – 2009 diperoleh nilai R^2 sebesar 0.978. Hal ini berarti sebesar 97,8 persen variasi PDRB di Jawa Tengah dapat dijelaskan oleh variasi empat variabel independennya yakni BHPBP (Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak), DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus), pekerja (L). Sedangkan sisanya sebesar 2,18 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

$$\begin{aligned} \text{PDRB} = & 1.20 \times 10^{13} + 7.870498 \text{ BHPBP} + 4.162108 \text{ DAU} + 9.083253 \text{ DAK} + \\ & 3881213 \text{ L} - 7.48 \times 10^{13} \text{ D}_1 - 1.40 \times 10^{13} \text{ D}_2 - 1.39 \times 10^{13} \text{ D}_3 - 1.39 \times 10^{13} \text{ D}_4 - 1.49 \times 10^{13} \\ & \text{D}_5 - 1.36 \times 10^{13} \text{ D}_6 - 1.43 \times 10^{13} \text{ D}_7 - 1.39 \times 10^{13} \text{ D}_8 - 1.32 \times 10^{13} \text{ D}_9 - 1.36 \times 10^{13} \text{ D}_{10} - \\ & 1.19 \times 10^{13} \text{ D}_{11} - 1.47 \times 10^{13} \text{ D}_{12} - 1.17 \times 10^{13} \text{ D}_{13} - 1.40 \times 10^{13} \text{ D}_{14} - 1.49 \times 10^{13} \text{ D}_{15} - \\ & 1.50 \times 10^{13} \text{ D}_{16} - 1.34 \times 10^{13} \text{ D}_{17} - 1.36 \times 10^{13} \text{ D}_{18} - 4.89 \times 10^{13} \text{ D}_{19} - 1.32 \times 10^{13} \text{ D}_{20} - \\ & 1.40 \times 10^{13} \text{ D}_{21} - 1.17 \times 10^{13} \text{ D}_{22} - 1.36 \times 10^{13} \text{ D}_{23} - 1.20 \times 10^{13} \text{ D}_{24} - 1.36 \times 10^{13} \text{ D}_{25} - \\ & 1.33 \times 10^{13} \text{ D}_{26} - 1.38 \times 10^{13} \text{ D}_{27} - 1.42 \times 10^{13} \text{ D}_{28} - 1.35 \times 10^{13} \text{ D}_{29} - 1.27 \times 10^{13} \text{ D}_{30} - \\ & 1.09 \times 10^{13} \text{ D}_{31} - 1.29 \times 10^{13} \text{ D}_{32} - 1.22 \times 10^{13} \text{ D}_{34} - 1.27 \times 10^{13} \text{ D}_{35} - E_{it} \end{aligned}$$

Dari regresi menggunakan metode FEM diatas maka diperoleh nilai koefisien regresi untuk setiap variabel dalam penelitian. Interpretasi hasil regresi pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, pekerja terhadap PDRB di Jawa Tengah Tahun 2007-2009 sebagai berikut :

a. Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak terhadap PDRB

Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam (bukan pajak). Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu.

Berdasarkan hasil regresi yang dihasilkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

berpengaruh positif dan signifikan pada tingkat signifikansi 5 persen terhadap PDRB di Jawa Tengah. Peningkatan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak sebesar 1 rupiah akan meningkatkan PDRB sebesar 7,870498 rupiah dengan asumsi *ceteris paribus*. Sesuai dengan fungsi produksi, peningkatan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak akan meningkatkan *output* di Jawa Tengah sampai pada batas tertentu. Dengan demikian hal ini sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan variabel Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Jawa Tengah.

Sesuai dengan penelitian Joko Waluyo (2007) bahwa Dana Bagi hasil pajak lebih menguntungkan daerah kota yang merupakan pusat bisnis dan industri karena basis pajak daerahnya lebih tinggi. Sedangkan bagi daerah yang kaya Sumber Daya alam lebih diuntungkan melalui mekanisme bagi hasil bukan pajak (Sumber Daya Alam). Alokasi dana bagi hasil SDA untuk investasi sektor kunci dalam perekonomian akan meningkatkan *output* daerah. Daerah-daerah yang memiliki SDA yang rendah mengandalkan penerimaan daerahnya melalui penerimaan daerah dari DAU dan DAK.

Besar pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak bergantung pada besar pajak yang diambil pusat dari daerah yang nantinya akan di bagi hasilkan kepada daerah. Sedangkan bagi hasil bukan pajak (SDA) bergantung dari potensi tiap daerah. Semakin tinggi Dana Bagi Hasil Pajak atau Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) maka potensi alokasi Dana Perimbangan semakin tinggi. Alokasi Dana Perimbangan yang tinggi akan menguntungkan daerah tersebut karena akan ada aktivitas perekonomian *spread effect* yang tinggi di daerah tersebut sehingga *output* juga meningkat. Salah satu contohnya adalah Kabupaten Kudus. Dengan adanya pabrik rokok (cukai rokok) maka aktifitas perekonomian di daerah tersebut meningkat. Aktivitas tersebut diantaranya adalah penyerapan tenaga kerja, sarana prasarana infrastruktur semakin baik, aktivitas perekonomian meningkat, peningkatan kesejahteraan masyarakat.

b. Dana Alokasi Umum terhadap PDRB

Variabel Dana Alokasi Umum adalah Dana Perimbangan yang bersifat *block grant* dan wewenang penggunaannya diserahkan kepada daerah. Dana

Alokasi Umum bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antar daerah dan agar daerah mampu melaksanakan tugas pelayanan minimal antar daerah dalam rangka desentralisasi. Dana Alokasi Umum berfungsi sebagai instrumen stimulus perekonomian daerah. Keberhasilan pengelolaan dan pembelanjaan Dana Alokasi Umum oleh pemerintah daerah, akan menentukan seberapa efektifkah Dana Alokasi Umum mendukung perekonomian daerah.

Berdasarkan hasil regresi yang dihasilkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan pada tingkat signifikansi 5 persen terhadap PDRB di Jawa Tengah. Peningkatan Dana Alokasi Umum di Jawa Tengah sebesar 1 rupiah akan meningkatkan PDRB sebesar 4,162108 rupiah dengan asumsi *ceteris paribus*. Ini sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan variabel DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Jawa Tengah. Sesuai dengan fungsi produksi, peningkatan Dana Alokasi Umum akan meningkatkan *output* di Jawa Tengah sampai pada batas tertentu. Diperkuat oleh penelitian Joko Waluyo (2007) bahwa DAU secara umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB.

DAU dialokasikan untuk pemerataan keuangan antar daerah dan sebagian besar digunakan untuk membiayai belanja aparatur. DAU digunakan untuk membiayai tugas pelayanan daerah untuk menciptakan efisiensi alokasi sehingga akan membantu stimulus ekonomi daerah. Melalui DAU maka daerah-daerah yang kekurangan modal akan terbantu sehingga akan membantu menciptakan kombinasi input produksi yang lebih optimal. Melalui alokasi DAU pemerintah pusat memiliki keinginan menciptakan kesamaan dalam ketersediaan sumberdaya finansial di tiap pemerintah daerah sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi tiap daerah untuk memproduksi *public capital*. Alokasi DAU diharapkan membantu kearah tercapainya keseimbangan pembangunan antar daerah. Akan tetapi kesempatan yang sama tidak berarti terciptanya hasil *output* yang sama di tiap daerah.

c. Dana Alokasi Khusus terhadap PDRB

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah salah satu mekanisme transfer keuangan Pemerintah Pusat ke daerah yang bertujuan untuk meningkatkan

penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai prioritas nasional serta mengurangi kesenjangan laju pertumbuhan antardaerah dan pelayanan antarbidang. DAK sangat berpengaruh dalam dinamika pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah. Sesuai dengan prinsip desentralisasi, tanggung jawab dan akuntabilitas bagi penyediaan pelayanan dasar masyarakat telah dialihkan kepada pemerintah daerah. DAK dititikberatkan di tiga bidang penerima yaitu pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jalan.

Berdasarkan hasil regresi yang dihasilkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan pada tingkat signifikansi 5 persen terhadap PDRB di Jawa Tengah. Peningkatan Dana Alokasi Khusus sebesar 1 rupiah akan meningkatkan PDRB sebesar 9,083253 rupiah dengan asumsi *ceteris paribus*. Dengan demikian hal ini sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB di Jawa Tengah. Sesuai dengan fungsi produksi, peningkatan Dana Alokasi Khusus akan meningkatkan *output* di Jawa Tengah sampai pada batas tertentu.

Dari analisis data menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang menunjukkan pengaruh paling besar dibanding dengan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, dan Dana Alokasi Umum. Pengaruh yang paling dominan itu karena Alokasi Dana Alokasi Khusus digunakan untuk pembiayaan infrastruktur yang sangat berpengaruh langsung dengan masyarakat. DAK digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberi prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup. Apabila dikelola dengan baik, DAK yang secara khusus digunakan untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana fisik ini akan mendorong kegiatan produksi barang dan jasa. Diharapkan dapat meningkatkan efektifitas pembangunan dan pelayanan umum sehingga *output* diharapkan meningkat sampai batas tertentu.

Sesuai dengan penelitian Bintoro Arianto (2002) Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. Oleh karena itu, Dana

Perimbangan dialokasikan pada pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan *output*. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan infrastruktur ekonomi berdasarkan kebutuhan dapat mendorong kegiatan produksi barang atau jasa sehingga ekonomi daerah akan tumbuh.

d. Pekerja terhadap PDRB

Angkatan Kerja terdiri dari mereka yang bekerja dan mereka yang menganggur dan mencari kerja. Besarnya penyediaan atau *supply* terhadap faktor produksi tenaga kerja dalam masyarakat merupakan jumlah orang yang menawarkan jasanya untuk kegiatan memproduksi barang dan jasa. Dan seperti apa yang telah dibahas sebelumnya, angkatan kerja dalam penelitian ini adalah angkatan kerja yang tergolong bekerja (pekerja).

Berdasarkan hasil uji regresi yang dihasilkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pekerja berpengaruh positif dan signifikan pada tingkat signifikansi 5 persen terhadap PDRB di Jawa Tengah. Peningkatan pekerja di Jawa Tengah sebesar 1 orang akan meningkatkan PDRB sebesar 3881213 rupiah dengan asumsi *ceteris paribus*. Sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan variabel pekerja berpengaruh terhadap PDRB di Jawa Tengah. Ini sesuai dengan teori pertumbuhan Neo-klasik Robert Solow bahwa tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi PDRB.

Secara kuantitas ketersediaan angkatan kerja sangat diperlukan untuk menggerakkan perekonomian melalui peningkatan produksi barang dan jasa. Jumlah pekerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti meningkatkan ukuran pasar domestiknya. Dengan kata lain, semakin banyak pekerja yang digunakan dalam proses produksi maka *output* hasil produksi akan mengalami peningkatan sampai batas tertentu.

Hasil variabel dummy signifikan, yaitu di bawah 0.05 maka dari data tersebut menunjukkan pola pada wilayah tersebut berbeda (tidak sama) dengan wilayah *benchmark*. Sehingga pertumbuhan ekonomi ke 34 kabupaten/kota di Jawa Tengah menunjukkan pola yang berbeda dengan Kota Semarang sebagai *benchmark*.

Berdasarkan hasil interpretasi individual yang telah dijelaskan, kesimpulan yang dapat diambil mengenai koefisien dummy masing-masing wilayah *dummy* jika dibandingkan dengan Kota Semarang sebagai wilayah *bechmark* adalah semua kabupaten/kota di Jawa Tengah memiliki output yang bernilai negatif jika dibandingkan dengan Kota Semarang sebagai *bechmark*. Sehingga output ke 34 kabupaten/kota di Jawa Tengah sebagai variabel *dummy* lebih rendah daripada Kota Semarang sebagai *benchmark*.

Dari pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Pengaruh Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus sebagai faktor *kapital* untuk daerah dan pekerja sebagai faktor *labour* berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. Atau sesuai dengan fungsi produksi bahwa peningkatan dana perimbangan dan pekerja akan meningkatkan *output* sampai pada batas tertentu.

E. KESIMPULAN, KETERBATASAN, SARAN

1. Kesimpulan

- a. Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Jawa Tengah.
- b. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Jawa Tengah.
- c. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Jawa Tengah.
- d. Pekerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Jawa Tengah.

Dana perimbangan (Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus) dan pekerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Jawa Tengah tahun 2007-2009. Dengan tingginya proporsi alokasi dana perimbangan menunjukkan masih rendahnya tingkat kemandirian keuangan daerah di Jawa Tengah tahun 2007-2009. Sedangkan pekerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Jawa Tengah karena secara kuantitas ketersediaan angkatan kerja yang tergolong bekerja sangat

penting untuk menggerakkan perekonomian dengan cara meningkatkan produksi barang dan jasa, semakin banyak angkatan kerja yang tergolong bekerja digunakan dalam proses produksi maka *output* hasil produksi akan mengalami peningkatan sampai batas tertentu.

Dilihat dari Hasil regresi terhadap variabel dummy wilayah, dimana Kota Semarang yang menjadi *benchmark* menunjukkan bahwa 34 Kabupaten/kota di Jawa Tengah memiliki tingkat output yang berbeda (tidak sama) dibandingkan kota Semarang sebagai wilayah *benchmark*.

2. Keterbatasan

Ada keterbatasan data DAK sebelum tahun 2007 dan data PDRB setelah tahun 2009 sehingga penelitian ini menggunakan data panel 3 tahun yaitu tahun 2007-2009. Penelitian ini menggunakan variabel Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan pekerja terhadap PDRB di Jawa Tengah. Ada beberapa aspek yang dapat dijadikan indikator untuk meningkatkan output seperti teknologi, investasi dan aspek lain untuk melanjutkan penelitian ini. Hasilnya dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan berbagai pihak yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk mencapai peningkatan output yang optimal.

3. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diberikan, maka dapat diberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut :

- a. Pungutan pajak oleh pusat dilakukan sesuai dengan asas equality dan efficiency. Asas equality adalah pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pengenaan pajak harus sebanding dengan kemampuan wajib pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Asas Efficiency adalah perolehan pajak harus lebih besar dari biaya pemungutan pajak. Asas tersebut dilakukan agar tidak menimbulkan distorsi terhadap wajib pajak yang akan berpengaruh pada kegiatan perekonomian sehingga berpengaruh pada PDRB dan menghambat output. Langkah yang dilakukan adalah pelayanan satu atap (kemudahan dalam membayar pajak online, transparansi). Hal itu dilakukan untuk menghindari kebocoran dan

wajib pajak tahu bahwa manfaat pajak akan diterima kembali oleh wajib pajak. Sehingga wajib pajak sadar pentingnya pajak sebagai kewajiban bukan menjadi beban.

Pemerintah daerah mengalokasikan dana bagi hasil sumber daya alam untuk pemberdayaan masyarakat setempat. Salah satu contohnya melalui penyuluhan yang disertai dengan kredit lunak sehingga diharapkan terjadi peningkatan aktivitas perekonomian yang nantinya akan mendorong peningkatan output.

- b. Sebagian besar Dana Alokasi Umum digunakan untuk belanja tidak langsung. Oleh karena itu, pemerintah daerah sebaiknya meningkatkan kinerja tugas pelayan kepada masyarakat. Dengan adanya peningkatan tugas pelayanan (kemudahan dalam pelayanan) kepada masyarakat diharapkan terjadi peningkatan produktivitas pelaku ekonomi sehingga terjadi stimulus perekonomian yang mendorong peningkatan output.
- c. Dana Alokasi Khusus sebaiknya digunakan untuk program-program layanan barang publik sehingga dapat menjadi alat pengontrol pemerintah pusat dalam menjamin ketersediaan pelayanan publik dasar sebagai alat pemerata pelayanan publik. Oleh karena itu, pemerintah pusat sebaiknya melakukan standarisasi pelayanan publik (standar pendidikan, standar kesehatan, infrastruktur jalan) agar efek langsung dan peningkatan kualitas output dirasakan oleh masyarakat.
- d. Pemerintah daerah sebaiknya menciptakan kesempatan kerja yang lebih banyak guna menyerap angkatan kerja yang tersedia agar dapat mengimbangi peningkatan jumlah angkatan kerja dengan cara merencanakan kegiatan-kegiatan di daerah yang dimungkinkan dibiayai dari dana perimbangan.

Tujuan awal dana perimbangan adalah sebagai faktor modal pemerintah daerah. Dengan adanya pengaruh signifikan terhadap PDRB artinya ada ketergantungan terhadap dana perimbangan. Oleh karena itu dengan berjalanya waktu pemerintah daerah sebaiknya mulai mengoptimalkan peran-peran sumber

keuangan asli daerah. Sehingga peran dana perimbangan dapat dikurangi dan digantikan dengan peran sumber keuangan asli daerah.

Pemerintah Kabupaten/kota secara periodik melakukan perencanaan anggaran tahun yang akan datang dan mengkoordinasikan dengan pusat agar pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai penerima pasif. Pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan efisiensi alokasi penggunaan dana perimbangan agar pengaruh yang diberikan semakin besar dalam penyerapan angkatan kerja. Dengan terserapnya angkatan kerja dapat menggerakkan masyarakat untuk meningkatkan output sampai pada batas tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2001. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UOO) AMP YKPN.
- Alberto Hirschman. 1970. *Teori dan Praktek Otonomi Daerah*. Jakarta: Grafindo.
- Amin Pujiati. 2008. "Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Karesidenan Semarang Era Desentralisasi Fiskal". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Kajian ekonomi berkembang hal 61-71
- Arsyad, Lincoln. 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Badan Pusat Statistik, 2009, *Jawa Tengah Dalam Angka*, Badan Pusat Statistik Jawa Tengah
- Badan Pusat Statistik, 2009, *PDRB Propinsi Jawa Tengah Menurut Kabupaten/Kota 2007-2009*, Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Tengah
- Bintoro Rianto. 2002. "Studi Transfer Pemerintah Dalam Era Desentralisasi di Indonesia: Kasus Dana Perimbangan". *Disertasi Tidak Dipublikasikan*, Program Studi Pascasarjana Ilmu Ekonomi, Universitas Indonesia
- Boediono. 1992. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Edisi 1. Yogyakarta: BPFE Universitas Gajah Mada.
- Dewi Pusporini. 2006. "Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Era Desentralisasi Fiskal 2001-2003". *Disertasi Tidak Dipublikasikan*, Program Studi Megister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Universitas Indonesia
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. 2009. *Laporan Realisasi APBD*. Jakarta.
- Farid Wijaya, 1992, *Kompendium Ekonomika: Ekonomika Pertumbuhan dan Internasional*, edisi 1, volume IV, BPFE- Yogyakarta.
- Firmansyah. *Modul Praktek Regresi Data Panel dengan Eviews 6*. Semarang: Laboratorium Studi Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi Undip.

- Green, William. 2001. "Estimating Econometric Models With Fixed Effects." *Departemen of Economics, Stern School of Business*. Amerika Serikat: New York University.
- Gujarati, Damodar N. 2003. *Basic Econometrics Fourth Edition*. The Mc. Growth Hill Compnies Inc. New York
- Gujarati, Damodar. 2007. *Dasar-dasar Ekonometrika*. Julius A. Mulyadi, S.E dan Yelvi Andri, S.E. Jilid 2. Jakarta : Erlangga.
- Imam Ghozali. 2009. *Ekonometrika Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan SPSS 17*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- J. Simanjuntak, Payaman. 1998. *Pengantar Ekonomi Sumberdaya Manusia*. Edisi 2 Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Jinghan, M L. 1990. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Penerjemah D. Guritno. Jakarta: Rajawali Pers.
- Joko Waluyo. 2007. "Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antardaerah di Indonesia". Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. JEL
- M. Suparmoko. 1994. *Keuangan Negara: Dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: BPFU Universitas Gajah Mada.
- M. Suparmoko. 2001. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Edisi Pertama. ANDI Yogyakarta. Yogyakarta.
- Mahfud Sidik. 2002. "Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebagai Pelaksana Desentralisasi Fiskal Antara Teori dan Aplikasinya di Indonesia", makalah pada seminar Setahun Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia, Jogjakarta, Maret
- Mudrajad Kuncoro. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Yogyakarta: Erlangga

- Nachrowi D. 2006. *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sadono Sukirno. 2004. *Pengantar Teori Makroekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sairi Erfanie. 2004. “Perkembangan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah”, Laporan Penelitian, LIPI
- Robinson Tarigan. 2007. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ke Tiga* . Drs. Haris Munandar, M.A dan Puji A.L, S.E. Edisi 9. Jakarta : Erlangga.
- Todaro, Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi*. Drs. Haris Munandar, M.A. Jakarta : Erlangga.
- W. Didit Udjianto. 2008. Analisis Dana Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus di DIY dan JATENG 2003-2005). “Journal Eksekutif, Vol. 5, No. 3, h.401-408
- Wing Wahyu Winarno. 2009. Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviws. Edisi kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.